

**IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PPK_n BERBASIS HAM DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN HAK ASASI MANUSIA SISWA SMP
(STUDI DI SMP NEGERI 1 TEMINABUAN)**

SKRIPSI

**Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**



OLEH

MARTINCE BRINJE

148720522044

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA SOSIAL DAN OLAAHRAGA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PPKN BERBASIS HAM DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN HAK ASASI MANUSIA SISWA SMP
(STUDI DI SMP NEGERI 1 TEMINABUAN)**

MARTINCE BRINJE

14872052044

Telah di setuju Skripsi oleh tim pembimbing

Pada.....

Pembimbing I

Dr. Ihsan, S.Pd, M.Pd.
NIDN. 1419108901



.....

Pembimbing II

Dwi Septipane, M.Pd.
NIDN. 1412088801



.....

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PPKN BERBASIS HAM DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN HAK ASASI MANUSIA SISWA SMP
(STUDI DI SMP NEGERI 1 TEMINABUAN)

Nama : Martince Brinje

NIM :148720522044

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Sosial dan Olahraga
(FABIO) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada : 12/06/2026

Dekan



Dr. Roni Andri Pramita, M.Pd.
NIDN.1411129001

Ketua Penguji

Dr. Ihsan, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 1419108901



Penguji I

Dr. Budi Santoso, M.Pd.
NIDN. 1406029201



Penguji II

Dwi Septipane, M.Pd.
NIDN. 1412088801



PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan Tinggi. dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini di sebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong, 18 April 2026



Nim : 148720522044

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Amsal 16:3 Serakanlah perbuatan mu kepada Tuhan maka terlaksanalah segala rencana mu
- Pendidikan adalah jalan menuju perubahan dan harapan yang lebih baik.

PERSEMBAHAN

Karya ku mempersembahkan untuk :

1. Tuhan yesus yang selalu melindungi ku disaat langkahku
2. Orang tua ku atas doa yang tak pernah henti untuk saya dan dukungan saya begitu luar biasa untuk keluarga
3. Dosen- dosen program studi ppkn
4. Teman teman ku atas dukungan dan motifasi terimakasih yang bukan saudara tetapi selalu ada.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Pembelajaran PPKn Berbasis HAM dalam Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia Siswa SMP (Studi di SMP Negeri 1 Teminabuan).”. Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Dr. Rustamadji, M.Si., selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai motivasi hebat.
2. Dr. Roni Andri Pramita, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Pendidikan, Bahasa, Sosial, dan Olahraga Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang telah memberikan kesempatan dan dukungan selama proses perkuliahan.
3. Dr. Ihsan, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan juga selaku Dosen Pembimbing satu yang memberikan arahan, serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Dwi Septipane, M.Pd., selaku Dosen pembimbing dua dalam penulisan skripsi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen dan staff Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan pengetahuan dan dorongan serta keteladanan selama penulis menjalani perkuliahan.
6. Orang tua tercinta yang telah mengasuh, mendidik, memberi motivasi agar penulis tetap semangat serta tidak berhenti terus mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
7. Teman-teman kelas yang tersayang angkatan 2022, terima kasih untuk kebersamaan, kekompakan dan kekeluargaan yang telah terjalan selama kurang lebih empat tahun ini, banyak pengalaman berharga selama menjalani perkuliahan bersama kalian.
8. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyelesaian penulisan skripsi ini yang belum sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik

dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa yang baik. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun agar menjadi lebih baik.
Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini mendapatkan imbalan yang melimpah Tuhan yang Maha Esa, Amin.

Sorong, 06 Juni 2026



Martince Brinje

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) di SMP Negeri 1 Teminabuan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengkaji dampaknya terhadap kesadaran siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model miles dan huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari guru PPKn dan siswa kelas VII sebagai subjek utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM dilakukan melalui berbagai strategi pembelajaran yang bersifat aktif dan partisipatif, seperti diskusi kelompok, tanya jawab, dan studi kasus. Guru juga menggunakan pendekatan kontekstual dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa dapat memahami nilai-nilai HAM secara lebih nyata. Selain itu, guru berperan sebagai fasilitator dan teladan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang inklusif dan kondusif. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan, antara lain keberagaman latar belakang siswa, kecenderungan siswa untuk berkelompok berdasarkan kesamaan, pengaruh lingkungan keluarga dan pergaulan, keterbatasan waktu pembelajaran, serta perbedaan tingkat pemahaman siswa. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran berbasis HAM memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dampak implementasi pembelajaran menunjukkan adanya perkembangan yang cukup positif terhadap kesadaran siswa. Hal ini terlihat dari perubahan sikap siswa yang lebih menghargai pendapat orang lain, mampu bekerja sama, serta menunjukkan sikap saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa siswa yang belum sepenuhnya konsisten dalam menerapkan nilai-nilai HAM. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn berbasis HAM memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran siswa, sehingga perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan dengan dukungan dari berbagai pihak.

Kata kunci: PPKn, Hak Asasi Manusia, Pembelajaran, Kesadaran Siswa

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Human Rights (HAM) - based Civic Education (PPKn) learning at SMP Negeri 1 Teminabuan, identify the challenges faced in its implementation, and examine its impact on students' awareness. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, direct observations, and documentation. The research participants consisted of PPKn teachers and seventh-grade students as the main subjects. The results show that the implementation of HAM-based Civic Education is carried out through active and participatory learning strategies such as group discussions, question-and-answer sessions, and case studies. Teachers also apply a contextual approach by linking learning materials with students' daily lives, enabling them to understand human rights values more concretely. In addition, teachers act as facilitators and role models in creating an inclusive and conducive learning environment. However, several challenges were identified, including students' diverse backgrounds, the tendency to form groups based on similarities, the influence of family and social environments, limited instructional time, and differences in students' levels of understanding. These challenges indicate that the implementation of human rights-based learning requires a comprehensive and continuous approach. The impact of the implementation shows a positive development in students' awareness. This is reflected in students' ability to respect others' opinions, collaborate effectively, and demonstrate helpful behavior in daily interactions. Nevertheless, some students have not consistently applied human rights values in all situations. In conclusion, HAM-based Civic Education plays a significant role in developing students' awareness, and therefore needs to be continuously improved with support from various stakeholders.

Keywords: Civic Education, Human Rights, Learning, Student Awareness

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR BIMBINGAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.6 Definisi Operasional	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Pendidikan PPKn	9
2.2 Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Konteks PPKn	11
2.3 Kesadaran Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan	14
2.4 Implementasi Pembelajaran PPKn Berbasis HAM di SMP	16
2.5 Penelitian Terdahulu	19
2.6 Kerangka Berpikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	24
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	24
3.3 Subjek Penelitian	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5 Alur Metode Penelitian	27
3.6 Teknik Analisis Data	28
3.7 Keabsahan Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	

4.1 Deskripsi Penelitian	34
4.2 Hasil Penelitian	37
4.3 Pembahasan	46
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	55
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	62

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia memiliki tujuan yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga mencakup pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM). Pendidikan berbasis HAM dalam konteks PPKn bertujuan untuk mengenalkan siswa pada hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu dan pentingnya menghargai hak-hak orang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syafira dan Arif [2024] penanaman nilai-nilai kesadaran HAM dapat dilakukan melalui integrasi nilai HAM dalam pembelajaran PPKn sehingga peserta didik mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Di tengah era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, masalah terkait HAM menjadi isu yang semakin mendesak. Menurut Hamjah, Noe dan Rajaloe [2023], pembelajaran PPKn berperan dalam menumbuhkan kesadaran HAM peserta didik agar mampu menghargai dan menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. " Oleh karena itu, pembelajaran PPKn berbasis HAM menjadi penting untuk membangun kesadaran siswa tentang hak asasi mereka serta cara melindungi dan menghormati hak orang lain, terlebih di negara yang majemuk seperti Indonesia.

Siswa SMP adalah kelompok usia yang berada dalam tahap kritis pembentukan nilai dan karakter. Seperti yang diungkapkan oleh Adawiyah ,Arianto,Primahardani pembelajaran PPKn memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran siswa melalui proses pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan ,kepatuhan terhadap aturan , dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari." Dengan demikian, pembelajaran tentang hak asasi manusia di usia ini dapat membantu membentuk pemahaman yang kuat mengenai hak individu dan bagaimana hak-hak tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga akan membentuk warga negara yang tidak hanya memahami hak-hak mereka, tetapi juga kewajiban mereka untuk menjaga dan menghormati hak orang lain.

Di SMP Negeri 1 Teminabuan, implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran siswa mengenai hak asasi manusia. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan pembelajaran ini di tingkat sekolah. Menurut Rayahu ,Saputri [2023] menyatakan bahwa guru PPKn memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran HAM siswa melalui proses pembelajaran dan pembinaan karakter ." Ini menunjukkan bahwa meskipun kurikulum PPKn sudah mengintegrasikan materi HAM, masih ada tantangan dalam hal penerapan yang optimal di lapangan.

Lebih jauh lagi, menurut Julmulyani ,Hariyanto ,Kurniawansyah ,dan Zubair [2021] tentang pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembelajaran PPKn di Smp."Pendidikan berbasis HAM harus disampaikan secara kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan lokal siswa, agar mereka dapat merasakan relevansinya dalam

kehidupan sehari-hari.” Dalam hal ini, SMP Negeri 1 Teminabuan memiliki potensi besar untuk menerapkan pembelajaran berbasis HAM yang dapat menghubungkan nilai-nilai global dengan konteks lokal yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang HAM harus disesuaikan dengan situasi sosial dan budaya yang ada di Kampung Teminabuan.

Penguatan kesadaran HAM di kalangan siswa bukan hanya menjadi tanggung jawab guru PPKn, tetapi juga harus melibatkan seluruh pihak di sekolah, termasuk orang tua dan masyarakat sekitar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Suryani (2020), “Pendidikan HAM tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus melibatkan komunitas yang lebih luas, baik di sekolah maupun di luar sekolah.” Dengan melibatkan berbagai pihak, kesadaran HAM dapat lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena siswa akan mendapatkan pengaruh dari berbagai sumber yang konsisten mengedepankan nilai-nilai tersebut.

Namun, implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM tidak selalu berjalan mulus. Guru-guru PPKn di SMP Negeri 1 Teminabuan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Prabowo (2020), “Sering kali menghadapi kesulitan dalam menghubungkan teori HAM dengan praktik kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa hanya mendapatkan informasi mengenai HAM secara tekstual dan teoritis.” Hal ini menunjukkan bahwa meskipun materi sudah ada dalam kurikulum, cara penyampaian yang hanya bersifat satu arah akan membatasi pemahaman siswa terhadap konsep HAM.

Lebih lanjut, penggunaan metode yang lebih interaktif dan aplikatif menjadi kunci dalam memperkenalkan nilai-nilai HAM kepada siswa. Menurut Patton (2002), “Metode pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep kompleks seperti hak asasi manusia, dengan memberi mereka kesempatan untuk menghubungkan teori dengan praktik.” Oleh karena itu, penerapan metode yang lebih partisipatif dalam pembelajaran PPKn berbasis HAM dapat meningkatkan keterlibatan siswa, sehingga mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, tantangan lain dalam penerapan pembelajaran ini adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang mendukung pembelajaran berbasis HAM. Dalam hal ini, penggunaan teknologi dan media sosial dapat menjadi alternatif yang sangat efektif. Seperti yang disarankan oleh Dede (2021), “Pemanfaatan teknologi, seperti penggunaan media sosial dalam pembelajaran HAM, dapat membantu siswa mengakses berbagai sumber informasi yang relevan dan memperkaya pemahaman mereka tentang isu-isu HAM secara lebih interaktif dan dinamis.” Dengan teknologi, materi HAM dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan siswa yang sangat dekat dengan dunia digital.

Di sisi lain, pembelajaran PPKn berbasis HAM juga dapat memperkenalkan siswa pada konsep-konsep seperti keadilan sosial, toleransi, dan hak-hak kelompok minoritas. Menurut Yunus (2020), “Pendidikan HAM di sekolah harus memperkenalkan siswa pada nilai-nilai keadilan sosial yang mengajarkan mereka untuk tidak hanya fokus pada hak-hak individu, tetapi juga pentingnya perlindungan

terhadap hak kelompok yang terpinggirkan.” Hal ini sangat relevan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan menghargai setiap individu tanpa memandang latar belakang.

Tantangan lainnya adalah bagaimana mengukur sejauh mana pembelajaran PPKn berbasis HAM telah berhasil meningkatkan kesadaran siswa terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fathurrahman (2019), “Evaluasi yang berkelanjutan dan partisipatif sangat penting untuk menilai sejauh mana pemahaman siswa mengenai HAM dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari.” Oleh karena itu, evaluasi yang mencakup pemahaman teoretis dan praktik nyata siswa akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai keberhasilan pembelajaran ini.

Dengan demikian, implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM di SMP Negeri 1 Teminabuan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap hak asasi manusia dan mengajarkan mereka untuk menghormati hak-hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ada kerjasama antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung proses pembelajaran yang berbasis pada prinsip-prinsip HAM. Dalam konteks ini, pendidikan PPKn berbasis HAM bukan hanya sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran siswa, tetapi juga sebagai langkah untuk membentuk generasi yang lebih peduli, adil, dan penuh toleransi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM di SMP Negeri 1 Teminabuan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM di SMP Negeri 1 Teminabuan?
3. Bagaimana pengaruh pembelajaran PPKn berbasis HAM terhadap kesadaran hak asasi manusia siswa di SMP Negeri 1 Teminabuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM di SMP Negeri 1 Teminabuan.
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM di SMP Negeri 1 Teminabuan.
3. Menganalisis pengaruh pembelajaran PPKn berbasis HAM terhadap kesadaran hak asasi manusia siswa di SMP Negeri 1 Teminabuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis:** Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan PPKn yang berbasis pada HAM, serta memperkaya literatur tentang pembelajaran hak asasi manusia di tingkat sekolah menengah.
2. **Manfaat Praktis:** Memberikan masukan kepada pihak sekolah, khususnya para guru PPKn, dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai hak asasi manusia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum dan materi ajar yang berbasis pada HAM.
3. **Manfaat Sosial:** Meningkatkan kesadaran siswa terhadap hak asasi manusia, sehingga dapat memperkuat rasa tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang peduli terhadap hak-hak mereka dan orang lain, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM di SMP Negeri 1 Teminabuan, yang terletak di Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Penelitian ini akan melibatkan siswa kelas IX, yang merupakan kelompok yang lebih matang dalam menerima materi

pembelajaran PPKn, serta guru PPKn yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kerancuan dalam pemahaman, berikut adalah beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

1. PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang sangat penting dalam sistem pendidikan Indonesia, bertujuan untuk membentuk karakter kewarganegaraan siswa melalui pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. PPKn tidak hanya menanamkan pengetahuan tentang nilai-nilai dasar negara, tetapi juga mengajarkan siswa untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan pengelolaan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan yang berbasis pada nilai sosial dan budaya, PPKn berfungsi untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran moral yang tinggi sebagai bagian dari masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat. Pembelajaran ini sangat penting dalam membangun rasa tanggung jawab terhadap negara serta membentuk kesadaran kolektif untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik, adil, dan sejahtera.

2. Pembelajaran PPKn Berbasis HAM (Hak Asasi Manusia)

Pembelajaran PPKn berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang mengintegrasikan konsep-konsep dasar HAM ke dalam materi pembelajaran PPKn, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu. Konsep-konsep tersebut mencakup hak hidup, kebebasan berpendapat, hak untuk tidak didiskriminasi, dan hak atas pendidikan, yang semuanya merupakan bagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembelajaran berbasis HAM bertujuan untuk tidak hanya mengenalkan siswa pada teori tentang hak-hak mereka, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hak-hak tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, siswa diharapkan tidak hanya memahami pentingnya hak asasi manusia dalam kerangka hukum, tetapi juga belajar untuk menghormati hak-hak orang lain, sehingga dapat hidup bersama dengan damai, adil, dan saling menghargai dalam keberagaman.

3. Kesadaran Hak Asasi Manusia

Kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) mengacu pada pemahaman siswa mengenai pentingnya hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu, serta sikap untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang melekat pada dirinya, yang harus dihormati oleh orang lain, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Selain itu, kesadaran HAM juga berkaitan

dengan kemampuan untuk mengidentifikasi pelanggaran terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta peran penting setiap individu dalam melindungi hak-hak tersebut. Peningkatan kesadaran HAM di kalangan siswa juga melibatkan pengembangan empati terhadap sesama, sehingga mereka lebih peka terhadap ketidakadilan dan diskriminasi yang terjadi di sekitar mereka. Dalam pembelajaran PPKn berbasis HAM, siswa tidak hanya diberi pengetahuan teoritis tentang hak-hak dasar manusia, tetapi juga diajak untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka, yang pada akhirnya membentuk mereka menjadi individu yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap penghormatan hak asasi manusia di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pendidikan PPKn

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang mendasar dalam sistem pendidikan di Indonesia, yang bertujuan untuk membentuk karakter kewarganegaraan siswa. Melalui PPKn, siswa diajarkan untuk memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, serta hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Koentjaraningrat (2009), "Pendidikan PPKn tidak hanya mengajarkan teori tentang sistem pemerintahan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku kewarganegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila."

Pendidikan PPKn mencakup banyak aspek, salah satunya adalah membentuk karakter moral yang baik pada siswa. Dalam konteks ini, PPKn bertujuan untuk membekali siswa dengan pemahaman tentang pentingnya hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam, serta cara-cara untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan adil. Sebagaimana diungkapkan oleh Suryani (2020), "PPKn membantu siswa untuk memahami pentingnya persatuan dalam keragaman dan peran aktif mereka dalam menjaga keberagaman tersebut." Oleh karena itu, pembelajaran PPKn sangat penting untuk menciptakan generasi muda yang bertanggung jawab, memiliki etika, dan peduli terhadap negara dan masyarakatnya.

Selain itu, PPKn juga mempersiapkan siswa untuk mengerti tentang berbagai masalah sosial, politik, dan budaya yang ada dalam masyarakat. Seperti yang

diungkapkan oleh Mulyana (2018), "Pendidikan PPKn memberikan siswa pemahaman tentang peran mereka dalam proses pembangunan sosial dan politik di Indonesia, serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam memperjuangkan kesejahteraan sosial." PPKn bukan hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengajarkan tata cara hidup bernegara, tetapi juga sebagai alat untuk membangun karakter siswa agar mereka dapat berperan aktif dalam kehidupan demokrasi.

Pendidikan PPKn juga mengajarkan siswa untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam kerangka negara hukum yang berbasis pada Pancasila. Dalam konteks ini, PPKn berperan dalam membentuk generasi muda yang tahu apa yang menjadi hak mereka dan apa yang menjadi kewajiban mereka dalam masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Setiyadi (2020), "Pendidikan PPKn adalah landasan bagi siswa untuk mengerti tentang pentingnya memiliki hak asasi yang dilindungi oleh negara dan kewajiban untuk menghormati hak orang lain."

Pendidikan PPKn berbasis nilai-nilai Pancasila juga membantu siswa untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan mereka. Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, persatuan, dan kerukunan, yang sangat relevan dalam pembentukan karakter siswa. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Wahyudi (2021), "Pendidikan berbasis Pancasila mengajarkan kepada siswa bahwa hidup dalam masyarakat yang majemuk memerlukan sikap saling menghormati dan menjaga kerukunan."

Pentingnya pembelajaran PPKn tidak hanya terletak pada pengetahuan yang diberikan, tetapi juga pada nilai-nilai karakter yang diajarkan melalui mata pelajaran

ini. Pendidikan PPKn menjadi penting dalam membentuk karakter siswa yang peduli terhadap masalah sosial, menghargai perbedaan, dan dapat bekerja sama dalam kerangka kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan PPKn tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga pembekalan karakter yang memadai.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan globalisasi, pendidikan PPKn harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan PPKn berbasis hak asasi manusia menjadi sangat relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai keadilan dan kebebasan bagi setiap individu. Menurut Fathurrahman (2017), "Pendidikan berbasis HAM sangat penting dalam membekali siswa untuk memahami hak-hak mereka serta hak orang lain, sehingga mereka dapat hidup dalam masyarakat yang lebih adil."

Pendidikan PPKn juga berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan kesadaran hukum dan etika kepada siswa. Siswa yang mendapatkan pendidikan PPKn berbasis nilai-nilai Pancasila dan HAM akan memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, mereka tidak hanya akan menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban mereka, tetapi juga warga negara yang taat pada hukum dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses pembelajaran PPKn, penting bagi guru untuk menggunakan metode yang interaktif dan kontekstual agar siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Seperti yang disarankan oleh Patton (2002), "Metode pembelajaran

berbasis proyek dan diskusi dapat membantu siswa untuk lebih aktif dalam mempelajari nilai-nilai PPKn dan HAM, serta memahami aplikasi praktisnya dalam kehidupan."

2.2 Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Konteks PPKn

Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi bagian yang sangat penting dalam pendidikan PPKn di Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan PPKn berbasis HAM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu, serta bagaimana hak-hak tersebut diakui dan dilindungi oleh negara. HAM sebagai bagian dari pembelajaran PPKn mengajarkan siswa tentang kebebasan individu, kesetaraan, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Integrasi materi HAM dalam PPKn sangat penting untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada siswa mengenai hak-hak mereka sebagai warga negara. Menurut Setiyadi (2020), "Pendidikan HAM mengajarkan siswa untuk mengenali dan menghargai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, serta mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut." Hal ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan sikap yang lebih peduli terhadap pelanggaran HAM yang mungkin terjadi di sekitar mereka dan lebih siap untuk bertindak dalam membela hak-hak mereka sendiri dan orang lain.

Sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan, pendidikan HAM di PPKn bertujuan untuk membentuk siswa yang tidak hanya tahu hak mereka, tetapi juga tahu bagaimana cara melindungi hak orang lain. PPKn berbasis HAM mengajarkan siswa

untuk tidak hanya menjadi penerima hak, tetapi juga untuk menghormati dan melindungi hak orang lain, sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Prabowo (2020), "Pendidikan berbasis HAM juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab individu dalam menjaga dan melindungi hak-hak orang lain."

Pendidikan HAM dalam PPKn juga mencakup pemahaman tentang peran negara dalam melindungi hak asasi setiap warganya. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak tersebut, dan hal ini harus diajarkan kepada siswa agar mereka memahami bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi oleh hukum dan negara. Dalam konteks ini, pendidikan PPKn berbasis HAM juga mengajarkan siswa untuk lebih peka terhadap ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat dan berperan aktif dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih baik.

Mengajarkan HAM dalam PPKn juga berhubungan dengan pentingnya pengembangan nilai-nilai sosial yang menghargai keberagaman dan menghormati hak setiap individu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fathurrahman (2017), "Pendidikan HAM harus membantu siswa untuk mengembangkan empati terhadap sesama, terutama terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan." Oleh karena itu, pendidikan PPKn berbasis HAM bertujuan untuk tidak hanya memberikan pengetahuan tentang hak-hak dasar, tetapi juga untuk menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan kepedulian sosial.

Selain itu, pembelajaran PPKn berbasis HAM dapat membantu siswa untuk lebih memahami dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Indonesia, sebagai

negara dengan berbagai suku, agama, dan budaya, membutuhkan generasi muda yang memiliki pemahaman yang kuat tentang hak asasi manusia, yang dapat mengaplikasikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan toleransi dalam kehidupan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Yunus (2020), "Pendidikan berbasis HAM di sekolah dapat menjadi sarana untuk mengurangi diskriminasi dan meningkatkan toleransi antara siswa dari berbagai latar belakang."

Pembelajaran HAM dalam PPKn juga dapat menjadi alat untuk melawan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi yang terjadi di masyarakat. Misalnya, dengan mengajarkan siswa tentang hak-hak mereka untuk hidup bebas dari diskriminasi, mereka akan lebih sadar tentang perlunya menjaga hak setiap individu tanpa memandang perbedaan latar belakang. Hal ini menjadi kunci dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya mengetahui hak mereka, tetapi juga berusaha untuk menciptakan lingkungan yang adil bagi semua.

Secara keseluruhan, pendidikan PPKn berbasis HAM bertujuan untuk menciptakan generasi yang sadar akan hak asasi manusia, yang tidak hanya memahami hak mereka sendiri, tetapi juga mampu menghormati hak orang lain dan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil, setara, dan damai.

2.3 Kesadaran Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan

Kesadaran hak asasi manusia (HAM) merupakan aspek yang sangat penting dalam pendidikan PPKn berbasis HAM. Kesadaran ini melibatkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, dan hak tersebut harus dihormati oleh semua pihak. Menurut Setiyadi (2020), "Kesadaran

akan hak asasi manusia tidak hanya sekadar pemahaman tentang apa itu HAM, tetapi juga pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain.” Kesadaran ini menjadi landasan bagi siswa untuk memahami bahwa hak setiap individu tidak boleh dilanggar, dan setiap orang berhak atas perlindungan hukum.

Pentingnya kesadaran HAM dalam pendidikan PPKn tidak hanya terletak pada peningkatan pengetahuan siswa tentang hak-hak dasar, tetapi juga dalam membentuk sikap mereka untuk menghormati dan melindungi hak orang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Mulyana (2018), "Kesadaran tentang HAM sangat penting untuk membangun rasa tanggung jawab sosial pada siswa, di mana mereka belajar untuk tidak hanya menuntut hak mereka, tetapi juga untuk menghargai hak orang lain." Hal ini menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan generasi muda yang peduli terhadap keadilan dan kesetaraan.

Siswa yang memiliki kesadaran HAM yang tinggi akan lebih peka terhadap ketidakadilan sosial dan dapat bertindak sebagai agen perubahan di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Fathurrahman (2017), “Pendidikan berbasis HAM mengajarkan siswa untuk memiliki empati terhadap sesama, serta mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran hak yang terjadi di lingkungan mereka.” Kesadaran ini juga mendorong siswa untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku aktif dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia di sekeliling mereka.

Di samping itu, pendidikan PPKn berbasis HAM membantu siswa untuk lebih memahami hak-hak mereka sendiri. Menurut Prabowo (2020), "Peningkatan kesadaran HAM di kalangan siswa mengajarkan mereka untuk tahu hak mereka dan

bagaimana cara melindunginya." Hal ini akan membantu siswa merasa lebih percaya diri dalam mempertahankan hak mereka dan lebih siap untuk menghadapi tantangan sosial yang berkaitan dengan ketidakadilan atau pelanggaran hak.

Kesadaran HAM juga berhubungan dengan pentingnya penerapan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh Setiawan (2018), "Pendidikan HAM di sekolah harus mendorong siswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang diajarkan dalam kehidupan sosial mereka, seperti menghargai kebebasan berpendapat dan menghormati hak orang lain dalam berbagai interaksi sosial." Pendidikan yang berbasis pada pemahaman ini akan mendorong siswa untuk lebih sadar akan pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan mereka.

Lebih lanjut, kesadaran tentang hak asasi manusia dapat membantu mencegah terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan di sekolah. Hal ini berkaitan dengan sikap siswa terhadap sesama yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Pendidikan PPKn berbasis HAM membekali siswa dengan pemahaman tentang pentingnya hidup berdampingan dengan menghormati perbedaan, dan hal ini sangat relevan dalam konteks keberagaman Indonesia yang multikultural.

Sebagai bagian dari pembelajaran PPKn, kesadaran HAM juga melibatkan pendidikan tentang hak-hak minoritas, yang sering kali terabaikan atau terdiskriminasi. Menurut Yunus (2020), "Salah satu aspek penting dalam kesadaran HAM adalah memperkenalkan siswa pada hak-hak minoritas, serta pentingnya menghargai dan melindungi hak kelompok yang terpinggirkan." Oleh karena itu,

pendidikan HAM perlu menyentuh isu-isu yang lebih luas terkait kesetaraan hak bagi semua lapisan masyarakat, baik mayoritas maupun minoritas.

Kesadaran HAM juga berkaitan dengan kemampuan siswa untuk melibatkan diri dalam upaya-upaya perubahan sosial. Pendidikan PPKn berbasis HAM mendorong siswa untuk tidak hanya memahami hak mereka, tetapi juga untuk ikut serta dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak tersebut dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Suryani (2020), "Siswa yang memiliki kesadaran HAM yang tinggi akan lebih proaktif dalam menghadapi isu-isu sosial yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti pelanggaran hak-hak pekerja atau diskriminasi rasial."

Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran HAM di kalangan siswa adalah dengan memberikan pengalaman langsung melalui kegiatan praktis yang melibatkan siswa dalam diskusi, debat, atau proyek yang berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Patton (2002), "Pembelajaran berbasis proyek dapat memberikan siswa kesempatan untuk mengidentifikasi masalah HAM yang relevan dengan kehidupan mereka dan mencari solusi yang sesuai." Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan nyata.

Akhirnya, penting untuk menyadari bahwa kesadaran HAM bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang sikap dan tindakan yang diambil untuk melindungi hak-hak manusia. Pendidikan PPKn berbasis HAM dapat menciptakan generasi yang lebih peduli terhadap masalah sosial, lebih peka terhadap

ketidakadilan, dan lebih siap untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

2.4 Implementasi Pembelajaran PPKn Berbasis HAM di SMP

Implementasi pembelajaran PPKn berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat SMP merupakan langkah yang sangat penting dalam mendidik generasi muda Indonesia tentang hak-hak mereka dan pentingnya menghargai hak orang lain. Menurut Setiyadi (2020), "Pendidikan berbasis HAM harus dapat diterapkan dengan cara yang kontekstual, menghubungkan teori dengan pengalaman nyata yang dapat dirasakan oleh siswa." Implementasi ini mengharuskan adanya penyesuaian antara materi yang diajarkan dan realitas sosial yang ada di lingkungan sekitar siswa.

Dalam implementasinya, pendidikan PPKn berbasis HAM harus disampaikan dengan metode yang menarik dan interaktif. Seperti yang diungkapkan oleh Prabowo (2020), "Pembelajaran berbasis HAM di SMP sebaiknya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mengajak siswa untuk berdiskusi, berdebatan, dan melakukan proyek-proyek yang berhubungan dengan HAM." Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami konsep HAM secara teoretis, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan pembelajaran PPKn berbasis HAM adalah **project-based learning** (pembelajaran berbasis proyek). Dalam metode ini, siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu proyek yang berhubungan dengan isu-isu HAM yang ada di masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Patton (2002), "Pembelajaran berbasis

proyek memberi kesempatan kepada siswa untuk berkolaborasi, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan menyelesaikan masalah HAM secara praktis." Proyek semacam ini dapat mencakup kegiatan seperti kampanye kesadaran tentang hak-hak minoritas atau penyuluhan mengenai kebebasan berpendapat.

Untuk mendukung implementasi yang efektif, guru perlu dilengkapi dengan pemahaman yang kuat mengenai konsep-konsep dasar HAM. Guru PPKn berperan penting dalam memfasilitasi diskusi dan memastikan bahwa materi HAM yang diajarkan dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Seperti yang diungkapkan oleh Fathurrahman (2017), "Guru perlu memiliki keterampilan dalam memfasilitasi diskusi yang berkaitan dengan hak asasi manusia, serta memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan siswa." Oleh karena itu, pelatihan bagi guru mengenai cara mengajar HAM dengan pendekatan yang lebih praktis dan kontekstual sangat diperlukan.

Implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM juga dapat dibantu dengan menggunakan teknologi informasi, seperti platform digital atau media sosial, untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Seperti yang dijelaskan oleh Dede (2021), "Penggunaan teknologi dalam pendidikan PPKn berbasis HAM memungkinkan siswa untuk mengakses sumber informasi yang lebih luas dan berpartisipasi dalam diskusi global mengenai isu-isu HAM." Teknologi dapat digunakan untuk memperkenalkan siswa pada perspektif internasional mengenai HAM, serta memungkinkan mereka untuk terlibat dalam diskusi global yang lebih luas.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM adalah kurangnya bahan ajar yang relevan dan mudah dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan materi ajar yang dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan karakteristik siswa. Seperti yang diungkapkan oleh Hidayat (2019), "Pengembangan bahan ajar yang berbasis pada isu-isu HAM yang relevan dengan kehidupan siswa akan meningkatkan minat mereka dalam mempelajari topik ini." Materi ajar ini harus mampu menghubungkan konsep-konsep global dengan situasi sosial yang dihadapi oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Penting juga untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pembelajaran PPKn berbasis HAM. Melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, kesadaran dan pemahaman tentang HAM dapat diperkuat. Seperti yang dijelaskan oleh Suharto (2019), "Pendidikan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan peran aktif orang tua dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran tersebut." Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara pihak sekolah, orang tua, dan komunitas sangat penting dalam mendukung implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM.

Untuk mengukur efektivitas pembelajaran PPKn berbasis HAM, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif. Evaluasi ini tidak hanya mencakup penilaian terhadap pengetahuan siswa tentang hak-hak asasi manusia, tetapi juga sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Setiawan (2018), "Evaluasi yang berbasis pada penerapan nilai-nilai HAM akan memberikan gambaran yang

lebih akurat mengenai sejauh mana siswa dapat mengaplikasikan konsep-konsep HAM dalam kehidupan mereka."

Keberhasilan implementasi pendidikan PPKn berbasis HAM di SMP sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan guru serta dukungan dari seluruh pihak terkait. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang memadai, pendidikan PPKn berbasis HAM dapat menjadi sarana yang efektif dalam membentuk generasi muda yang sadar akan hak-hak mereka dan peduli terhadap hak-hak orang lain.

2.5 Penelitian Terdahulu

Untuk memahami lebih dalam mengenai implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM dan pengaruhnya terhadap kesadaran hak asasi manusia siswa di SMP, beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat dijadikan acuan. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana pendidikan berbasis HAM dapat diterapkan dalam konteks pendidikan di Indonesia, serta tantangan dan manfaat yang dapat diperoleh. Di bawah ini, beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik ini akan diuraikan untuk memberikan dasar teori yang kuat bagi penelitian ini.

1. **Hasan (2021)** dalam penelitiannya yang berjudul "Pendidikan Kebangsaan Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Adat" menyatakan bahwa pendidikan berbasis nilai-nilai kebangsaan, yang mencakup hak asasi manusia, dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap keberagaman dan pentingnya toleransi dalam masyarakat yang majemuk. Penelitian ini menunjukkan

bahwa pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan HAM dapat meningkatkan empati siswa terhadap sesama.

2. **Prabowo (2020)** melakukan studi mengenai "Peran Kearifan Lokal dalam Penguatan Kebangsaan di Wilayah Multikultural". Penelitiannya menyoroti bahwa penerapan nilai-nilai HAM dalam pendidikan, yang dikaitkan dengan kearifan lokal, memberikan dampak yang signifikan dalam memperkuat semangat kebangsaan, terutama pada generasi muda yang terpapar oleh berbagai macam kebudayaan.
3. **Suryani (2021)** dalam penelitian berjudul "Implementasi Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Semangat Kebangsaan di Komunitas Adat" menemukan bahwa pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM dapat memperkuat rasa kebangsaan dan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hak-hak individu dan kelompok dalam konteks masyarakat adat. Penelitiannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan pendidikan berbasis HAM di sekolah-sekolah adat memperkaya wawasan siswa tentang kesetaraan dan keadilan sosial.
4. **Setiyadi (2020)** dalam penelitiannya yang berjudul "Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis" menyatakan bahwa pendidikan yang berbasis HAM harus didukung dengan kurikulum yang relevan dan implementasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendidikan berbasis HAM dapat mengurangi ketidakadilan sosial di sekolah dan masyarakat.

5. **Mulyana (2018)** dalam penelitiannya yang berjudul "Pendidikan Kewarganegaraan: Integrasi Nilai-Nilai HAM dalam Pembelajaran di Sekolah" menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam pendidikan kewarganegaraan. Penelitiannya menunjukkan bahwa integrasi ini mampu meningkatkan kesadaran siswa mengenai hak asasi manusia dan membentuk karakter siswa yang peduli terhadap hak orang lain.
6. **Yunus (2020)** dalam penelitian berjudul "Pendidikan Hak Asasi Manusia untuk Siswa SMP di Indonesia" menemukan bahwa pendidikan berbasis HAM memiliki dampak positif dalam membangun karakter siswa, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak dasar manusia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan pendidikan berbasis HAM lebih cenderung untuk menghormati hak-hak orang lain.
7. **Suryani (2020)** dalam penelitiannya yang berjudul "Kearifan Lokal dan Toleransi dalam Masyarakat Majemuk" menunjukkan bahwa pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai HAM dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Penelitiannya mengungkapkan bahwa mengajarkan nilai-nilai HAM kepada siswa membantu mereka untuk memahami pentingnya toleransi, keadilan, dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari.
8. **Fathurrahman (2017)** dalam penelitiannya yang berjudul "Evaluasi Pembelajaran PPKn Berbasis Hak Asasi Manusia" menyarankan agar pendidikan berbasis HAM diterapkan dengan lebih kontekstual di Indonesia. Penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan PPKn yang berbasis pada

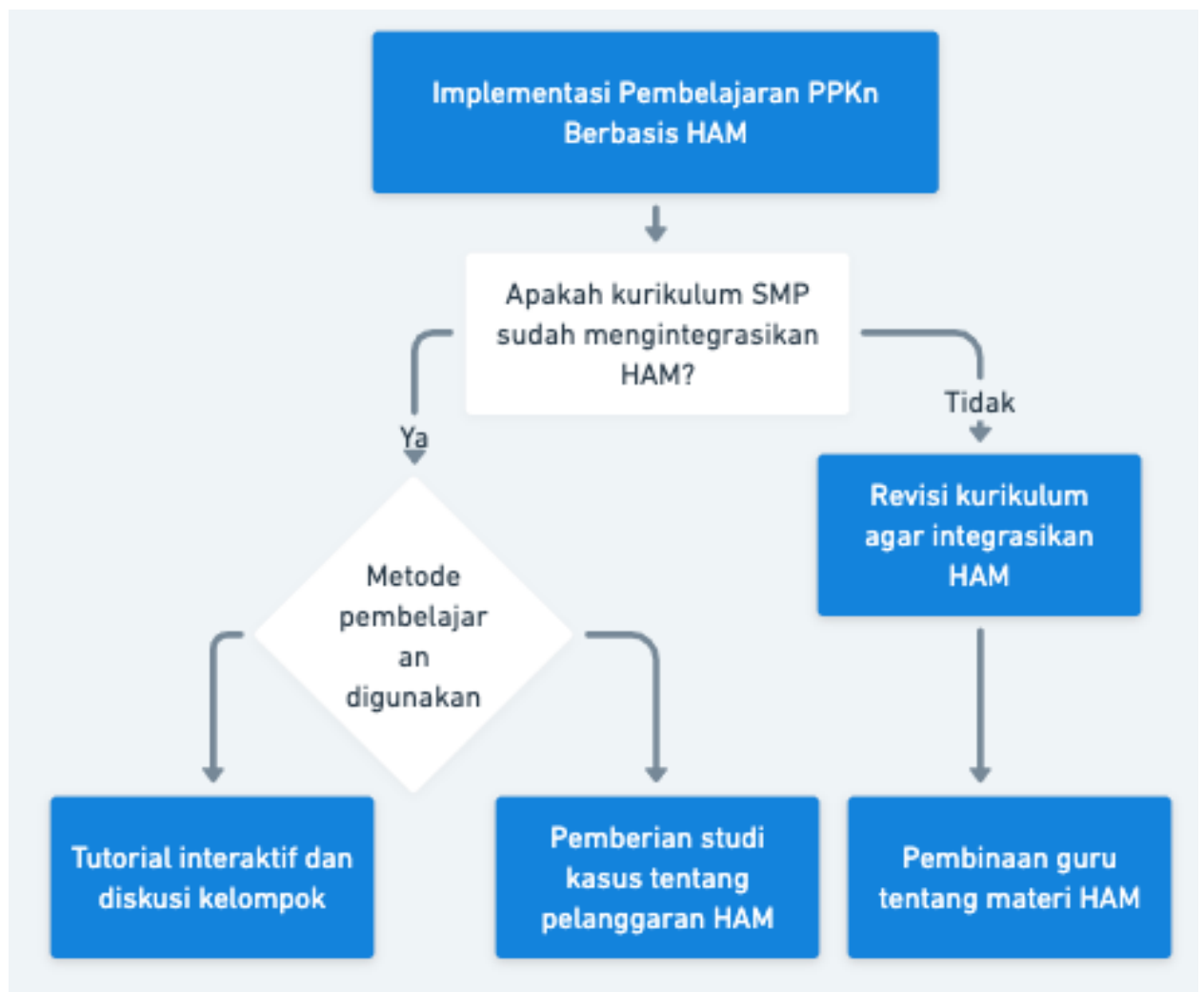
prinsip-prinsip HAM dapat meningkatkan kesadaran sosial dan mendorong siswa untuk lebih peduli terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar mereka.

9. **Setiawan (2018)** dalam penelitiannya yang berjudul "Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran PPKn: Mengintegrasikan Nilai HAM pada Generasi Muda" menjelaskan bahwa pendekatan kontekstual dalam pembelajaran PPKn berbasis HAM dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan mereka. Penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan pendekatan ini dapat membantu siswa untuk mengidentifikasi masalah sosial dan hak asasi manusia yang relevan dengan kehidupan mereka.
10. **Hidayat (2019)** dalam penelitiannya berjudul "Tantangan dan Peluang Implementasi Pendidikan HAM di Sekolah" mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam implementasi pendidikan HAM adalah kurangnya pemahaman dari guru tentang konsep HAM, serta keterbatasan sumber daya pendidikan yang mendukung pembelajaran berbasis HAM. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pelatihan bagi guru agar mereka dapat mengajarkan materi HAM dengan efektif dan relevan.

Dari penelitian-penelitian yang telah diulas di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan PPKn berbasis HAM memberikan dampak yang signifikan dalam membentuk kesadaran hak asasi manusia pada siswa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengintegrasian materi HAM dalam pendidikan

kewarganegaraan tidak hanya meningkatkan pengetahuan siswa tentang hak-hak mereka, tetapi juga membekali mereka dengan sikap dan perilaku yang menghargai hak orang lain. Meskipun ada berbagai tantangan dalam implementasi pembelajaran berbasis HAM, seperti keterbatasan pemahaman guru dan sumber daya yang terbatas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis HAM dapat menciptakan generasi muda yang lebih peduli terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini akan berusaha mengidentifikasi lebih jauh bagaimana implementasi pendidikan PPKn berbasis HAM di SMP Negeri 1 Teminabuan dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap hak asasi manusia dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis HAM di sekolah.

2.6 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang terjadi di SMP Negeri 1 Teminabuan terkait dengan implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM dan pengaruhnya terhadap kesadaran hak asasi manusia siswa. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menggali lebih dalam pengalaman dan persepsi dari para informan tentang penerapan pendidikan berbasis HAM dalam pembelajaran PPKn di sekolah tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Creswell (2014), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dari suatu fenomena sosial dalam konteks tertentu.

Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pembelajaran PPKn berbasis HAM diterapkan, serta bagaimana dampaknya terhadap kesadaran hak asasi manusia siswa. Penelitian deskriptif berfokus pada penyajian data yang akurat mengenai fenomena yang terjadi di lapangan tanpa melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pembelajaran dan hasil yang dicapai, serta untuk memahami bagaimana siswa, guru, dan orang tua memandang implementasi pendidikan berbasis HAM.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Teminabuan, yang terletak di Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Pemilihan sekolah ini didasarkan pada keberagaman sosial budaya yang ada di komunitas tersebut, yang memberikan konteks penting bagi implementasi pendidikan berbasis HAM. Keberagaman budaya di Teminabuan menjadi latar yang sangat relevan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai HAM dapat diajarkan dalam konteks yang beragam, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai HAM tersebut. Menurut Suharto (2019), "Pendidikan berbasis HAM di lingkungan masyarakat yang majemuk dan beragam sangat penting untuk membangun kesadaran akan keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap hak individu."

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama tiga bulan, mulai dari bulan Maret hingga Mei 2026. Waktu penelitian ini dipilih untuk mencocokkan dengan jadwal pembelajaran dan kegiatan di SMP Negeri 1 Teminabuan, serta untuk memastikan pengumpulan data yang representatif mengenai implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini meliputi siswa kelas IX, guru PPKn, dan orang tua siswa. Siswa kelas IX dipilih karena mereka telah mempelajari materi PPKn yang lebih mendalam dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak asasi manusia dibandingkan dengan siswa di tingkat yang lebih rendah. Guru PPKn di SMP Negeri 1 Teminabuan juga menjadi subjek utama, karena mereka terlibat

langsung dalam proses pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM. Selain itu, orang tua siswa juga diwawancarai untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang penerapan pendidikan berbasis HAM di rumah dan bagaimana mereka mendukung pendidikan hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yang berarti bahwa subjek penelitian dipilih berdasarkan karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian. Seperti yang dijelaskan oleh Patton (2002), "Purposive sampling memungkinkan peneliti untuk memilih individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung dengan fenomena yang sedang diteliti, sehingga menghasilkan data yang lebih relevan dan mendalam."

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan guru PPKn, siswa, dan orang tua siswa. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman mereka mengenai implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM dan dampaknya terhadap kesadaran siswa mengenai hak asasi manusia. Teknik wawancara semi-terstruktur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menjelajahi topik yang lebih luas dan memberi ruang bagi responden untuk berbagi pandangan secara bebas namun terarah. Seperti yang dijelaskan oleh Braun dan Clarke (2006), "Wawancara semi-terstruktur memberi fleksibilitas dalam

menggali pengalaman pribadi informan, yang membantu peneliti mendapatkan wawasan yang lebih mendalam."

2. Observasi Partisipatif

Peneliti akan melakukan observasi partisipatif terhadap proses pembelajaran PPKn berbasis HAM yang dilakukan di SMP Negeri 1 Teminabuan. Peneliti akan mengamati interaksi antara guru dan siswa, serta respons siswa terhadap materi pembelajaran yang berfokus pada hak asasi manusia. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana materi HAM diterima dan diterapkan dalam dinamika kelas. Seperti yang dijelaskan oleh Spradley (1980), "Observasi partisipatif memberi peneliti kesempatan untuk terlibat dalam konteks sosial yang sedang diamati, yang memungkinkan pengumpulan data yang lebih otentik."

3. Dokumentasi

Peneliti juga akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti silabus, bahan ajar, dan laporan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan pendidikan berbasis HAM di sekolah. Dokumentasi ini akan digunakan untuk mendukung data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta memberikan gambaran yang lebih jelas tentang materi yang diajarkan, metode yang digunakan, dan strategi evaluasi yang diterapkan.

3.5 Alur Metode Penelitian

Alur penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan .Tahapan pertama adalah menentukan fokus penelitian mengenai implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM dalam meningkatkan kesadaran hak asasi manusia siswa di SMP Negeri 1 Teminabuan.Tahapan kedua adalah menentukan informasi penelitian yang terdiri atas kepala sekolah, guru ppkn, siswa, dan orangtua. Yang ketiga adalah pengumpulan data melalui obsrvasi,wawancara, dan dokumentasi. Tahap ke empat adalah melakukan analisis data dengan cara mengumpulkan , mereduksi menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data yang di peroleh . Dan tahap terakhir adalah melakukan pemeriksaan keabsahan data dan menyusun laporan hasil penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan analisis data 4 langkah menurut Miles dan Huberman (1994), yang meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengkodean Data (Reduksi Data)

Data yang terkumpul akan dikodekan dengan cara mengorganisasi informasi ke dalam kategori atau tema tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kode ini membantu peneliti untuk menyaring dan mengelompokkan informasi yang memiliki kesamaan, sehingga dapat memudahkan proses analisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk narasi atau tabel yang memuat informasi yang relevan mengenai penerapan pembelajaran PPKn berbasis HAM. Penyajian data ini bertujuan untuk menggambarkan temuan-temuan utama dalam penelitian secara jelas dan terstruktur.

3. Verifikasi Data

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti akan melakukan **triangulasi** dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, baik itu wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Verifikasi juga akan dilakukan dengan *member checking*, yaitu meminta konfirmasi dari informan mengenai hasil wawancara untuk memastikan akurasi data yang diperoleh.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dianalisis, langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dalam langkah ini, peneliti akan menghubungkan temuan-temuan dengan tujuan penelitian, serta menarik kesimpulan mengenai bagaimana implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM memengaruhi kesadaran hak asasi manusia siswa. Penarikan kesimpulan ini juga akan mencakup rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis HAM.

3.7 Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik verifikasi:

1. Triangulasi Sumber

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dibandingkan untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Member Checking

Hasil wawancara akan dikirimkan kembali kepada informan untuk memastikan akurasi dan kesesuaian data yang diperoleh dengan pemahaman mereka.

3. Peningkatan Keandalan

Peneliti akan melakukan observasi berulang kali untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tetap konsisten dan valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

SMP Negeri 1 Teminabuan merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah pertama yang berada di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Sekolah ini memiliki karakteristik lingkungan sosial yang cukup beragam, di mana siswa berasal dari latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Keberagaman ini menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), karena siswa dihadapkan langsung pada realitas sosial yang plural. Dalam konteks ini, sekolah menjadi ruang strategis untuk menanamkan nilai-nilai HAM yang menekankan pada penghargaan terhadap perbedaan dan keadilan sosial.

Secara geografis, SMP Negeri 1 Teminabuan terletak di wilayah yang cukup strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Letak sekolah yang berada di pusat aktivitas masyarakat menyebabkan siswa yang bersekolah berasal dari berbagai lingkungan sosial yang berbeda. Hal ini menciptakan dinamika sosial yang cukup kompleks dalam kehidupan sekolah, terutama dalam interaksi antar siswa yang memiliki latar belakang yang beragam. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam penerapan pembelajaran berbasis HAM.

Dari segi sosial, siswa di SMP Negeri 1 Teminabuan memiliki karakteristik yang heterogen. Mereka berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi, budaya, dan pendidikan yang berbeda. Keberagaman ini mempengaruhi cara berpikir,

bersikap, dan berinteraksi antar siswa. Dalam satu kelas, terdapat siswa dengan berbagai karakter dan pengalaman sosial yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran yang mampu mengakomodasi perbedaan tersebut.

Lingkungan sekolah menunjukkan adanya interaksi sosial yang aktif antara siswa. Dalam kegiatan sehari-hari, siswa tidak hanya berinteraksi dalam proses pembelajaran di kelas, tetapi juga dalam kegiatan di luar kelas seperti istirahat, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan sosial lainnya. Interaksi ini menjadi sarana penting dalam menumbuhkan kesadaran HAM, terutama dalam hal menghargai hak orang lain dan menghindari tindakan diskriminatif.

Dari hasil observasi awal, terlihat bahwa sebagian siswa sudah memiliki pemahaman dasar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Namun, masih terdapat beberapa siswa yang belum sepenuhnya memahami pentingnya menghargai hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari adanya perilaku seperti bercanda berlebihan, kurang menghargai pendapat teman, atau kurang disiplin dalam mengikuti aturan sekolah.

Dari segi sarana dan prasarana, sekolah ini memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Tersedia ruang kelas, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya yang dapat digunakan dalam pembelajaran PPKn berbasis HAM. Namun, pemanfaatan fasilitas tersebut dalam pembelajaran masih perlu dioptimalkan agar dapat mendukung pembelajaran yang lebih interaktif.

Guru PPKn di SMP Negeri 1 Teminabuan memiliki peran penting dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis HAM. Guru tidak hanya

menyampaikan materi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai HAM. Dalam proses pembelajaran, guru berusaha menciptakan suasana yang kondusif dan inklusif agar siswa dapat belajar dengan nyaman. Selain itu, sekolah juga memiliki berbagai aturan dan kebijakan yang mendukung penanaman nilai HAM, seperti tata tertib yang mengatur perilaku siswa, serta program yang berkaitan dengan pembentukan karakter. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi siswa dalam berperilaku di lingkungan sekolah.

Dalam kegiatan pembelajaran, guru PPKn sering menggunakan metode diskusi dan studi kasus untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan HAM. Hal ini bertujuan agar siswa dapat memahami materi secara lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan. Hubungan antara guru dan siswa di sekolah ini terjalin dengan baik, sehingga menciptakan suasana belajar yang nyaman. Guru berusaha membangun komunikasi yang terbuka agar siswa dapat menyampaikan pendapat mereka tanpa rasa takut.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam implementasi pembelajaran berbasis HAM, seperti keterbatasan waktu dan perbedaan tingkat pemahaman siswa. Hal ini menjadi tantangan bagi guru dalam menyampaikan materi secara efektif. SMP Negeri 1 Teminabuan memiliki kondisi yang cukup mendukung untuk implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM. Keberagaman yang ada menjadi konteks yang relevan dalam menanamkan nilai-nilai HAM kepada siswa. Dengan demikian, lokasi

penelitian ini sangat tepat untuk mengkaji implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM serta pengaruhnya terhadap kesadaran siswa mengenai hak asasi manusia.

4.2 HASIL PENELITIAN

4.2.1 Implementasi Pembelajaran PPKn Berbasis HAM di SMP Negeri 1

Teminabuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PPKn, diketahui bahwa implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM di SMP Negeri 1 Teminabuan telah dilakukan melalui perencanaan pembelajaran yang dituangkan dalam perangkat pembelajaran seperti silabus dan RPP. Guru menyampaikan bahwa materi tentang hak dan kewajiban, nilai-nilai demokrasi toleransi, keadilan, serta penghormatan terhadap hak orang lain selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran, guru menggunakan berbagai metode yang bersifat partisipatif, seperti diskusi kelompok, tanya jawab, dan studi kasus. Guru menyampaikan bahwa metode diskusi digunakan untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam menyampaikan pendapat dan belajar menghargai pendapat orang lain. Dalam kegiatan diskusi, siswa dibagi ke dalam kelompok yang heterogen agar mereka dapat berinteraksi dengan teman yang berbeda latar belakang. Guru juga memberikan pertanyaan pemicu yang berkaitan dengan isu-isu HAM agar siswa dapat berpikir kritis. Melalui metode ini, siswa tidak hanya memahami konsep HAM secara teoritis, tetapi juga belajar menerapkannya dalam interaksi sosial di kelas.

Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa guru aktif dalam mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Guru sering memberikan contoh kasus yang terjadi di lingkungan sekolah maupun masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, seperti tindakan diskriminasi atau perundungan. Siswa kemudian diminta untuk memberikan pendapat dan solusi terhadap kasus tersebut. Kegiatan ini membuat siswa lebih memahami pentingnya menghargai hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa terlihat lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran karena materi yang disampaikan relevan dengan pengalaman mereka.

Hasil wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa mereka merasa pembelajaran PPKn berbasis HAM cukup menarik dan mudah dipahami. Siswa menyampaikan bahwa mereka sering diajak untuk berdiskusi dan membahas kasus-kasus yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini membuat mereka lebih memahami materi yang diajarkan. Selain itu, siswa juga merasa bahwa pembelajaran tersebut membantu mereka untuk lebih menghargai teman-teman yang berbeda latar belakang.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru juga menggunakan berbagai media pembelajaran untuk mendukung pemahaman siswa. Berdasarkan hasil dokumentasi, terlihat bahwa guru menggunakan bahan ajar seperti buku, lembar kerja siswa, serta contoh kasus yang diambil dari berita atau pengalaman sehari-hari. Penggunaan media ini membantu siswa untuk memahami materi secara lebih konkret. Namun, penggunaan media berbasis teknologi masih terbatas dan belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pembelajaran.

Hasil Wawancara dengan kepala sekolah / Wakil kepala sekolah

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah / wakil kepala sekolah , di peroleh informasi bahwa sekolah sangat mendukung implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan sekolah yang bertujuan menciptakan lingkungan didik.

Hasil Wawancara dengan Orang Tua siswa

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa , diperoleh informasi bahwa pembelajaran PPKn berbasis HAM memberikan pengaruh positif terhadap perilaku anak di rumah .Orang tua menyampaikan bahwa anak mulai menunjukkan sikap yang sopan dan bertanggung jawab. Dan juga orang tua melihat adanya peningkatan kesadaran anak dalam menjaga hubungan yang baik dengan teman dan lingkungan sekitar

4.2.2 Hambatan dalam Implementasi Pembelajaran PPKn Berbasis HAM di SMP Negeri 1 Teminabuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PPKn, diketahui bahwa salah satu hambatan utama dalam implementasi pembelajaran berbasis HAM adalah keberagaman latar belakang siswa yang cukup tinggi. Guru menyampaikan bahwa perbedaan suku, agama, dan budaya seringkali mempengaruhi cara siswa berinteraksi satu sama lain di dalam kelas. Dalam beberapa situasi, perbedaan tersebut memunculkan kesalahpahaman yang berdampak pada kurangnya sikap saling menghargai. Guru harus berusaha memberikan pemahaman secara berulang agar siswa dapat menerima perbedaan tersebut. Kondisi ini menjadi tantangan karena tidak

semua siswa memiliki pemahaman awal yang sama tentang pentingnya menghargai hak orang lain. Selain itu, perbedaan bahasa daerah juga terkadang menjadi hambatan dalam komunikasi antar siswa, sehingga menyebabkan miskomunikasi dalam interaksi sehari-hari.

Hasil wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa sebagian dari mereka masih merasa lebih nyaman berinteraksi dengan teman yang memiliki latar belakang yang sama. Siswa mengaku bahwa mereka cenderung memilih teman yang berasal dari suku atau agama yang sama karena merasa lebih mudah dalam berkomunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa sikap inklusif belum sepenuhnya berkembang pada semua siswa. Kondisi ini menjadi hambatan dalam implementasi pembelajaran berbasis HAM karena interaksi yang terbatas dapat mengurangi kesempatan siswa untuk belajar menghargai perbedaan.

Berdasarkan hasil observasi di kelas, terlihat bahwa dalam kegiatan kelompok, beberapa siswa masih menunjukkan kecenderungan untuk berkumpul dengan teman yang sudah akrab. Meskipun guru telah mengatur pembagian kelompok secara heterogen, namun interaksi dalam kelompok belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Beberapa siswa terlihat kurang aktif dalam berdiskusi ketika berada dalam kelompok yang berbeda latar belakang. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat rasa kurang nyaman dalam berinteraksi dengan teman yang berbeda. Selain itu, hasil wawancara dengan guru menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan keluarga juga menjadi salah satu hambatan dalam implementasi pembelajaran berbasis HAM. Guru menyampaikan bahwa beberapa siswa membawa nilai-nilai dari lingkungan keluarga

yang kurang mendukung sikap toleransi. Hal ini terlihat dari cara siswa berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah. Dalam beberapa kasus, siswa menunjukkan sikap yang kurang menghargai perbedaan, yang diduga dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka dibesarkan.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan pergaulan di luar sekolah turut mempengaruhi sikap siswa. Siswa sering membawa kebiasaan dari luar sekolah ke dalam lingkungan kelas, yang terkadang tidak sejalan dengan nilai-nilai HAM yang diajarkan. Hal ini menjadi tantangan bagi guru karena tidak semua lingkungan memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan sikap siswa.

Keterbatasan waktu dalam pembelajaran juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil wawancara, guru menyampaikan bahwa waktu yang tersedia dalam pembelajaran PPKn seringkali tidak cukup untuk membahas materi secara mendalam sekaligus menanamkan nilai-nilai HAM. Guru harus membagi waktu antara penyampaian materi dan pembinaan sikap siswa, sehingga proses pembelajaran tidak dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman siswa juga menjadi kendala dalam implementasi pembelajaran. Tidak semua siswa mampu memahami materi dan nilai yang diajarkan dengan cepat. Beberapa siswa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami konsep HAM. Hal ini membuat guru harus memberikan perhatian khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kurangnya media pembelajaran yang variatif menjadi salah satu hambatan dalam pembelajaran. Guru menyampaikan

bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika didukung dengan media yang menarik. Namun, keterbatasan fasilitas membuat guru harus mengandalkan metode pembelajaran yang sederhana.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang kurang disiplin dalam mengikuti aturan yang berkaitan dengan nilai HAM. Misalnya, masih terdapat siswa yang bercanda berlebihan atau kurang menghargai teman. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai HAM belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM cukup beragam, baik yang berasal dari faktor internal siswa maupun faktor eksternal seperti keluarga dan lingkungan. Hambatan-hambatan tersebut memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat agar pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efektif.

4.2.3 Dampak Implementasi Pembelajaran PPKn Berbasis HAM terhadap Kesadaran Siswa

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, diketahui bahwa implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM memberikan dampak yang cukup positif terhadap kesadaran siswa dalam memahami hak dan kewajiban mereka. Siswa menyampaikan bahwa melalui pembelajaran tersebut, mereka mulai memahami bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati. Pemahaman ini tidak hanya terbatas pada materi yang diajarkan di kelas, tetapi juga mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Siswa mengaku bahwa mereka menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara agar tidak melanggar hak orang lain. Hal

ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis HAM mulai membentuk kesadaran siswa secara bertahap.

Hasil observasi di kelas menunjukkan bahwa siswa mulai menunjukkan perubahan sikap dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Siswa terlihat lebih menghargai pendapat orang lain dalam kegiatan diskusi. Ketika terjadi perbedaan pendapat, siswa tidak lagi menunjukkan sikap yang terlalu emosional, melainkan mencoba untuk mendengarkan dan memahami pandangan teman mereka. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam kemampuan siswa untuk menghargai perbedaan sebagai bagian dari nilai HAM.

Dalam kegiatan kerja kelompok, terlihat bahwa siswa mulai menunjukkan sikap kerja sama yang lebih baik. Siswa saling membantu dalam menyelesaikan tugas dan tidak menunjukkan sikap diskriminatif terhadap teman yang berbeda latar belakang. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis HAM telah memberikan pengaruh terhadap pola interaksi sosial siswa. Kerja sama yang terjalin dalam kelompok menjadi salah satu indikator bahwa siswa mulai memahami pentingnya menghargai hak orang lain.

Hasil wawancara dengan guru juga menunjukkan bahwa terdapat perubahan perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran berbasis HAM. Guru menyampaikan bahwa siswa menjadi lebih sopan dalam berbicara dan lebih menghargai teman-temannya. Selain itu, siswa juga mulai menunjukkan sikap peduli terhadap teman yang mengalami kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM mulai terinternalisasi dalam diri siswa. Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa siswa

mulai berani menyampaikan pendapat mereka dalam pembelajaran. Siswa tidak lagi merasa takut untuk berbicara di depan kelas. Hal ini menunjukkan bahwa siswa merasa dihargai dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Kebebasan ini menjadi salah satu bentuk penerapan nilai HAM dalam lingkungan sekolah.

Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, siswa juga mulai menunjukkan sikap saling menghormati. Misalnya, siswa tidak lagi mengejek teman yang berbeda latar belakang dan lebih menjaga sikap dalam berinteraksi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran siswa terhadap pentingnya menghargai hak orang lain semakin meningkat. Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tidak semua siswa mengalami perubahan yang signifikan. Masih terdapat beberapa siswa yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran masih perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau seluruh siswa.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, siswa masih menunjukkan sikap kurang disiplin dalam mengikuti aturan yang berkaitan dengan nilai HAM. Misalnya, masih terdapat siswa yang bercanda berlebihan atau kurang menghargai teman. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai HAM masih perlu diperkuat. Selain itu, hasil dokumentasi menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru telah memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kesadaran HAM. Kegiatan seperti diskusi dan studi kasus menjadi sarana bagi siswa untuk memahami dan menerapkan nilai HAM dalam kehidupan nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM memberikan dampak yang cukup positif terhadap kesadaran siswa. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, namun secara umum siswa telah menunjukkan perkembangan dalam memahami dan menerapkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari.

4.3 PEMBAHASAN

4.3.1 Implementasi Pembelajaran PPKn Berbasis HAM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran PPKn berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) di SMP Negeri 1 Teminabuan dilakukan melalui pendekatan pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Guru menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan studi kasus untuk melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pengembangan sikap dan nilai siswa. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Hasan (2021) yang menyatakan bahwa pembelajaran yang bersifat partisipatif dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai sosial, termasuk nilai HAM. Selain itu, penggunaan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran menunjukkan bahwa guru berusaha mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Guru memberikan contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat memahami makna HAM secara lebih konkret. Hal ini sesuai dengan pendapat Suryani (2022) yang menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual dapat membantu siswa dalam memahami konsep secara lebih mendalam karena dikaitkan dengan pengalaman nyata.

Implementasi pembelajaran berbasis HAM juga terlihat dari upaya guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran tanpa membedakan latar belakang mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahayu (2022) yang menyatakan bahwa lingkungan belajar yang inklusif merupakan salah satu faktor penting dalam menumbuhkan kesadaran HAM pada siswa. Selain itu, penggunaan metode diskusi kelompok menunjukkan bahwa interaksi sosial menjadi sarana penting dalam pembelajaran HAM. Dalam diskusi, siswa belajar untuk menyampaikan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Kurniawan (2021) yang menyatakan bahwa interaksi dalam kelompok dapat membantu siswa dalam mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan.

Peran guru sebagai fasilitator juga terlihat dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya memberikan materi, tetapi juga mengarahkan jalannya diskusi dan memberikan penguatan terhadap nilai-nilai HAM. Hal ini sejalan dengan pendapat Wibowo (2021) yang menyatakan bahwa guru memiliki peran penting dalam membimbing siswa untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai sosial. Selain itu, penggunaan studi kasus dalam pembelajaran menunjukkan bahwa guru berusaha mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Siswa diajak untuk menganalisis masalah yang berkaitan dengan pelanggaran HAM dan mencari solusi yang tepat. Hal ini sesuai dengan pendapat Prabowo (2021) yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.

Implementasi pembelajaran berbasis HAM juga terlihat dari adanya penilaian yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada sikap dan perilaku siswa. Guru mengamati bagaimana siswa berinteraksi dan menerapkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pendapat Fadillah (2022) yang menyatakan bahwa penilaian dalam pendidikan karakter harus mencakup aspek sikap dan perilaku. Pendekatan personal yang dilakukan oleh guru menunjukkan bahwa pembelajaran HAM membutuhkan perhatian khusus terhadap setiap siswa. Guru memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami nilai HAM. Hal ini sesuai dengan pendapat Sujanto (2020) yang menyatakan bahwa pendekatan individual dapat membantu siswa dalam mengembangkan sikap yang positif.

Penggunaan berbagai metode pembelajaran menunjukkan bahwa guru berusaha menciptakan pembelajaran yang variatif dan menarik. Hal ini penting untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (2018) yang menyatakan bahwa pendekatan yang fleksibel dalam pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas proses belajar. Implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM menunjukkan bahwa guru telah melakukan berbagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai HAM kepada siswa. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, namun strategi yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran yang menekankan pada pengembangan sikap dan karakter siswa.

4.3.2 Hambatan dalam Implementasi Pembelajaran PPKn Berbasis HAM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM di SMP Negeri 1 Teminabuan adalah keberagaman latar belakang siswa yang cukup tinggi. Perbedaan suku, agama, dan budaya mempengaruhi cara siswa berinteraksi dalam proses pembelajaran. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Kurniawan (2021) yang menyatakan bahwa keberagaman dalam lingkungan pendidikan dapat menjadi tantangan apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, guru dituntut untuk mampu mengelola perbedaan tersebut agar tidak menimbulkan konflik, melainkan menjadi sarana pembelajaran yang positif. Selain itu, kecenderungan siswa untuk berkelompok berdasarkan kesamaan latar belakang juga menjadi hambatan dalam pembelajaran berbasis HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa merasa lebih nyaman berinteraksi dengan teman yang memiliki kesamaan, sehingga interaksi dengan siswa lain menjadi terbatas. Hal ini sejalan dengan pendapat Jenkins (2003) yang menyatakan bahwa individu cenderung membentuk identitas sosial berdasarkan kesamaan dengan kelompok tertentu. Kondisi ini menjadi tantangan bagi guru dalam menciptakan interaksi yang lebih inklusif.

Pengaruh lingkungan keluarga juga menjadi faktor yang mempengaruhi sikap siswa terhadap nilai HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa siswa membawa nilai-nilai dari lingkungan keluarga yang kurang mendukung sikap menghargai hak orang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Sujanto (2020) yang menyatakan bahwa lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk

sikap dan perilaku anak. Oleh karena itu, guru harus bekerja lebih keras dalam memberikan pemahaman kepada siswa. Pengaruh lingkungan sosial di luar sekolah juga menjadi hambatan dalam implementasi pembelajaran. Siswa tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga dari lingkungan pergaulan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini sejalan dengan pendapat Tahir (2020) yang menyatakan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan sikap individu. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk mengimbangi pengaruh dari luar.

Keterbatasan waktu dalam pembelajaran juga menjadi salah satu hambatan yang dihadapi oleh guru. Waktu yang tersedia dalam pembelajaran PPKn seringkali tidak cukup untuk membahas materi secara mendalam sekaligus menanamkan nilai HAM. Hal ini sejalan dengan pendapat Wibowo (2021) yang menyatakan bahwa keterbatasan waktu dapat menghambat proses internalisasi nilai dalam pembelajaran.

Perbedaan tingkat pemahaman siswa juga menjadi kendala dalam implementasi pembelajaran. Tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam memahami konsep HAM, sehingga guru harus menggunakan pendekatan yang berbeda untuk setiap siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Fadillah (2022) yang menyatakan bahwa perbedaan individu dalam pembelajaran memerlukan strategi yang beragam. Selain itu, kurangnya minat sebagian siswa terhadap pembelajaran PPKn juga menjadi kendala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, sehingga mempengaruhi pemahaman mereka terhadap nilai HAM. Hal ini sejalan dengan pendapat Prabowo (2021) yang

menyatakan bahwa motivasi belajar sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran.

Keterbatasan media pembelajaran juga menjadi hambatan dalam implementasi pembelajaran berbasis HAM. Penggunaan media yang kurang variatif dapat membuat pembelajaran menjadi kurang menarik bagi siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Suryani (2022) yang menyatakan bahwa media pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan pemahaman siswa. Masih adanya perilaku siswa yang kurang menghargai hak orang lain menunjukkan bahwa proses pembelajaran belum sepenuhnya berhasil. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahayu (2022) yang menyatakan bahwa pembentukan sikap membutuhkan proses yang panjang dan berkelanjutan. Hambatan dalam implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM menunjukkan bahwa proses pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi hambatan tersebut agar pembelajaran dapat berjalan secara optimal.

4.3.3 Dampak Implementasi Pembelajaran PPKn Berbasis HAM terhadap Kesadaran Siswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM memberikan dampak yang positif terhadap kesadaran siswa dalam memahami dan menghargai hak asasi manusia. Siswa mulai menunjukkan perubahan dalam sikap dan perilaku, seperti lebih menghargai pendapat orang lain serta mampu bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek

afektif siswa. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Hasan (2021) yang menyatakan bahwa pembelajaran nilai dapat membentuk sikap sosial siswa melalui pengalaman belajar yang bermakna. Kemampuan siswa dalam menghargai perbedaan pendapat menunjukkan adanya perkembangan dalam kesadaran HAM. Dalam kegiatan diskusi, siswa belajar untuk menerima pandangan yang berbeda tanpa memaksakan kehendak mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahayu (2022) yang menyatakan bahwa sikap toleransi merupakan bagian penting dari kesadaran HAM yang dapat berkembang melalui interaksi sosial.

Penerapan nilai HAM juga terlihat dalam kemampuan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. Siswa tidak lagi menunjukkan sikap diskriminatif terhadap teman yang berbeda latar belakang. Hal ini sejalan dengan pendapat Kurniawan (2021) yang menyatakan bahwa kerja kelompok dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menghargai perbedaan dan membangun hubungan sosial yang harmonis. Sikap saling membantu yang ditunjukkan oleh siswa juga mencerminkan adanya kesadaran terhadap nilai HAM. Siswa menunjukkan kepedulian terhadap teman yang mengalami kesulitan, baik dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Fadillah (2022) yang menyatakan bahwa nilai HAM tidak hanya berkaitan dengan hak individu, tetapi juga dengan tanggung jawab sosial untuk membantu sesama.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa siswa mulai berani menyampaikan pendapat mereka dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa siswa merasa memiliki kebebasan dalam mengekspresikan diri. Kebebasan ini merupakan salah

satu prinsip dasar dalam HAM. Hal ini sejalan dengan pendapat Sujanto (2020) yang menyatakan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang harus dihormati. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua siswa mengalami perubahan yang signifikan. Masih terdapat beberapa siswa yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pendapat Prabowo (2021) yang menyatakan bahwa pembentukan sikap membutuhkan proses yang berkelanjutan dan tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Masih adanya siswa yang kurang menghargai perbedaan menunjukkan bahwa kesadaran HAM belum sepenuhnya merata. Hal ini sejalan dengan pendapat Wibowo (2021) yang menyatakan bahwa internalisasi nilai memerlukan pembinaan yang terus-menerus agar dapat tertanam secara kuat dalam diri siswa.

Peran guru dalam membimbing siswa juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran HAM. Guru tidak hanya memberikan materi, tetapi juga memberikan contoh dan arahan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pendapat Suryani (2022) yang menyatakan bahwa guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa. Lingkungan sekolah yang kondusif juga mendukung perkembangan kesadaran HAM siswa. Suasana yang aman dan nyaman memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara positif dengan teman-temannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Tahir (2020) yang menyatakan bahwa lingkungan sosial yang baik dapat mendukung pembentukan sikap yang positif.

Dampak implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM menunjukkan adanya perkembangan yang positif dalam kesadaran siswa. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, namun pembelajaran ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk sikap siswa yang lebih menghargai hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) di SMP Negeri 1 Teminabuan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM telah dilaksanakan melalui berbagai strategi pembelajaran yang bersifat aktif dan partisipatif. Guru menggunakan metode diskusi, tanya jawab, serta studi kasus yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru juga menerapkan pendekatan kontekstual dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Implementasi ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan karakter siswa dalam menghargai hak asasi manusia.
2. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis HAM, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh guru. Hambatan tersebut meliputi keberagaman latar belakang siswa yang mempengaruhi pola interaksi sosial, kecenderungan siswa untuk berkelompok berdasarkan kesamaan, serta pengaruh lingkungan keluarga dan pergaulan di luar sekolah. Selain itu, keterbatasan waktu dalam pembelajaran dan perbedaan tingkat pemahaman siswa juga menjadi kendala

dalam proses pembelajaran. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran berbasis HAM tidak hanya dipengaruhi oleh faktor di dalam kelas, tetapi juga oleh faktor eksternal.

3. Implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM memberikan dampak yang cukup positif terhadap kesadaran siswa. Hal ini terlihat dari perubahan sikap siswa yang lebih menghargai pendapat orang lain, mampu bekerja sama dalam kelompok, serta menunjukkan sikap saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga mulai berani menyampaikan pendapat dan menunjukkan sikap yang lebih inklusif dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa siswa yang belum sepenuhnya konsisten dalam menerapkan nilai-nilai HAM.

Implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM di SMP Negeri 1 Teminabuan telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran guru sebagai fasilitator dan teladan dalam pembelajaran, serta dukungan lingkungan sekolah yang cukup kondusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis HAM agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PPKn berbasis HAM memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran siswa terhadap hak asasi manusia dan dalam menumbuhkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sosial.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi guru PPKn, diharapkan dapat terus mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan variatif dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis HAM. Guru perlu memanfaatkan berbagai metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, serta menggunakan media pembelajaran yang menarik agar siswa lebih mudah memahami materi. Selain itu, guru juga diharapkan dapat terus memberikan keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagai bentuk nyata dari nilai-nilai HAM.
2. Bagi pihak sekolah, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dalam mendukung implementasi pembelajaran berbasis HAM. Sekolah perlu memperkuat kebijakan yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai HAM, serta menyediakan fasilitas dan media pembelajaran yang memadai. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran siswa terhadap hak asasi manusia.
3. Bagi siswa, diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Siswa perlu belajar untuk menghargai perbedaan, baik dalam hal pendapat, suku, maupun agama, serta menghindari sikap diskriminatif terhadap teman.

Selain itu, siswa juga diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai tersebut tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat.

4. Bagi orang tua, diharapkan dapat memberikan dukungan dalam menanamkan nilai-nilai HAM kepada anak. Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sikap dan perilaku anak, sehingga diperlukan kerja sama antara sekolah dan orang tua dalam mendidik anak agar memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hak asasi manusia.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan yang berbeda. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai model pembelajaran berbasis HAM yang lebih efektif atau mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesadaran HAM pada siswa.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan implementasi pembelajaran PPKn berbasis HAM dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembentukan karakter siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, F. (2018). *Pendidikan Pancasila Berbasis Nilai-Nilai HAM dalam Membangun Karakter Kewarganegaraan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Sosial, 12(3), 88-102.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dede, A. (2021). *Pendidikan HAM di Era Digital: Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran Kewarganegaraan*. Jurnal Pendidikan Sosial dan Teknologi, 8(1), 45-59.
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Aldine Publishing.
- Fadillah, M. (2022). Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran kewarganegaraan di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(1), 45–59.
- Fathurrahman, M. (2017). *Evaluasi Pembelajaran PPKn Berbasis Hak Asasi Manusia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 14(2), 112-127.

- Hasan, J. (2021). Strategi pembelajaran aktif dalam meningkatkan kesadaran nilai sosial siswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 16(1), 112–127.
- Hidayat, T. (2019). Tantangan dan Peluang Implementasi Pendidikan HAM di Sekolah. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, 7(3), 210-225.
- Jenkins, R. (2003). *Social identity* (2nd ed.). Routledge.
- Koentjaraningrat, (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurniawan, R. (2021). Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pembentukan sikap toleransi dan kesadaran sosial siswa. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 8(3), 45–59.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Mulyana, H. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan: Integrasi Nilai-Nilai HAM dalam Pembelajaran di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Pancasila*, 10(2), 78-91.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. SAGE Publications.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. Holt, Rinehart, and Winston.
- Prabowo, Y. (2020). Peran Kearifan Lokal dalam Penguatan Kebangsaan di Wilayah Multikultural. *Jurnal Pemuda dan Budaya*, 14(3), 87-99.
- Prabowo, Y. (2021). Model pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. *Jurnal Pemuda dan Budaya*, 14(3), 87–99.

- Rahayu, I. (2022). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hak asasi manusia siswa. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Kewarganegaraan*, 10(1), 50–65.
- Setiawan, D. (2018). *Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran PPKn: Mengintegrasikan Nilai HAM pada Generasi Muda*. Jurnal Pendidikan Nasional, 9(1), 99-112.
- Setiyadi, D. (2020). *Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jurnal Pendidikan Sosial, 9(4), 115-128.
- Suharto, I. (2019). *Studi Etnografi Kearifan Lokal dalam Masyarakat Adat*. Jakarta: Gramedia.
- Sujanto, F. (2020). Peran guru dalam pembentukan karakter dan kesadaran sosial siswa di sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 5(2), 34–47.
- Suryani, L. (2020). *Kearifan Lokal dan Toleransi dalam Masyarakat Majemuk*. Jurnal Sosial dan Budaya, 8(2), 115-130.
- Suryani, L. (2022). Pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan pemahaman nilai HAM. *Jurnal Kepemimpinan Adat*, 12(2), 78–90.
- Suyanto, A. (2017). Pendidikan HAM untuk Membangun Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 21-36.
- Tahir, M. (2020). Dinamika sosial dalam masyarakat multikultural dan implikasinya terhadap pendidikan. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 9(2), 20–30.

- Wahyudi, T. (2021). *Pembelajaran PPKn Berbasis HAM dalam Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 15(3), 78-92.
- Wibowo, A. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk karakter siswa. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 18(4), 56–71.
- Yunus, M. (2020). *Pendidikan Hak Asasi Manusia untuk Siswa SMP di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Karakter, 6(1), 22-36.

INSTRUMEN PENELITIAN

1) Instrumen Wawancara (Semi-terstruktur)

A. Wawancara Guru PPKn

INSTRUMEN PENELITIAN

1) Instrumen Wawancara (Semi-terstruktur)

A. Wawancara Guru PPKn

Nama : FARIDA PELUPEST, S-IP
 Umur : 27 TAHUN
 Lama mengajar : 2 x 40 MENIT
 Kelas yang diampu : IX C

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Bapak/Ibu memahami konsep PPKn berbasis HAM dalam pembelajaran di SMP?	Mengintuisi nilai-nilai kebhinekaan dan belajar materi PPKn untuk menganalisis kasus nyata
2	Bagaimana perencanaan pembelajaran HAM dituangkan dalam silabus/RPP/tujuan pembelajaran?	dan mengintegrasikan nilai-nilai PPKn dan HAM ke dalam capaian. Tujuan pembelajaran yang harus dimiliki, dan sikap, dan nilai
3	Materi HAM apa yang paling sering diajarkan pada kelas IX, dan mengapa dipilih?	Materi HAM dan kewajiban warga negara. Karena dipilih untuk meningkatkan pemahaman, kepekaan, dan sikap
4	Metode apa yang Bapak/Ibu gunakan (diskusi, studi kasus, debat, proyek, role play) untuk membuat HAM menjadi kontekstual?	Metode yang sering digunakan dalam kelas bagi siswa adalah diskusi, kelompok, studi kasus, debat, proyek.
5	Media/sumber belajar apa yang digunakan untuk memperkuat pemahaman HAM (buku, video, berita, contoh kasus lokal)?	Sumber yang saya gunakan adalah buku siswa, video, berita di sosial media
6	Bagaimana strategi Bapak/Ibu mengelola kelas agar diskusi HAM tetap aman, menghargai perbedaan, dan tidak memicu konflik?	- Melakukan kesepakatan kelas antar siswa dan guru - Membangun suasana yang inklusif dan aman - Menghargai perbedaan
7	Hambatan utama yang Bapak/Ibu hadapi dalam implementasi pembelajaran HAM (pemahaman guru, waktu, fasilitas, karakter siswa, dukungan sekolah)?	Waktu, dan karakter siswa.
8	Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi hambatan tersebut? (contoh tindakan nyata)	Untuk mengatasinya hambatan tersebut saya lakukan adalah melakukan identifikasi agar pembelajaran
9	Bagaimana Bapak/Ibu menilai kesadaran HAM siswa (indikator, bentuk penilaian sikap/perilaku, tugas, refleksi)?	Melakukan indikator Penilaian Mencauskan Penilaian sikap, tugas dan refleksi akhir pembelajaran
10	Perubahan apa yang paling terlihat pada siswa setelah pembelajaran HAM? (contoh perilaku di kelas/sekolah)	- Siswa mulai menghargai satu sama lain - dan kontak diskusi, kelompok siswa belajar menghargai pendapat dan

B. Wawancara Siswa

B. Wawancara Siswa

Nama : BA. PERA OKTA PUTRI CEMARAHELLE
 Umur : 17 TAHUN
 Kelas : IX.D

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Anda, apa itu hak asasi manusia? Sebutkan contoh yang dekat dengan kehidupan siswa.	- Hak asasi manusia adalah hak yang sudah dimiliki manusia sejak lahir. - contoh nyata adalah: di kelas saat mentaw, berikan pendapat.
2	Bagian pembelajaran PPKn apa yang paling membuat Anda paham tentang HAM?	BAB yang membahas tentang hak dan kewajiban.
3	Apakah guru memberi contoh kasus nyata (di sekolah/masyarakat)? Ceritakan satu contoh yang Anda ingat.	Terdapat beberapa kasus tentang kasus seperti bullying yang dibahas.
4	Dalam pembelajaran, apakah Anda pernah berdiskusi/berdebat tentang kasus pelanggaran HAM? Bagaimana prosesnya?	Pernah saat berdiskusi, karena Pok karena ada yang mempunyai pandangan yang berbeda.
5	Apakah pembelajaran HAM membuat Anda lebih menghargai teman (misalnya beda pendapat/latar belakang)? Jelaskan.	Iya karena dari pelajaran ini saya tidak memandang latar belakang teman.
6	Jika melihat tindakan yang tidak adil (membully, diskriminasi, merendahkan), apa yang biasanya Anda lakukan?	Saya akan menentang korban, lalu menasihati pelaku, dan melaporkan ke BK.
7	Hambatan apa yang membuat siswa sulit menerapkan nilai HAM (takut bicara, pengaruh teman, kebiasaan, aturan sekolah)?	Pengaruh teman dan pengaruh lain, pengaruh teman masa lalu juga.
8	Apa perubahan sikap Anda setelah belajar HAM (cara berbicara, menghargai, menyelesaikan konflik)?	Saya belajar untuk lebih menghargai dan tidak main sendiri.
9	Apakah ada kegiatan sekolah yang mendukung HAM (tata tertib anti-bullying, OSIS, penyuluhan)? Ceritakan.	Poster anti bullying, Penjelasan tentang Perundungan.
10	Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki agar pembelajaran HAM lebih mudah dipahami dan diterapkan?	Mengajar lebih banyak yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

C. Wawancara Orang Tua Siswa

C. Wawancara Orang Tua Siswa

Nama : ELISABETH TUALAHURUW
 Umur : 37 TAHUN
 Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
 Anak (kelas) : IX A

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting pendidikan HAM untuk anak SMP?	Pendidikan HAM sangat penting karena membantu anak memahami hak dan kewajiban.
2	Apakah anak pernah bercerita tentang pelajaran HAM di PPKn? Bagian apa yang paling sering ia ceritakan?	Ya, anak saya sering bercerita tentang pentingnya memberi tahu teman dan tidak melakukan bullying di sekolah.
3	Perubahan apa yang Bapak/Ibu lihat pada anak setelah belajar HAM (cara bicara, sikap menghargai, empati)?	Anak menjadi lebih sebandar juga dalam berbicara lebih menghargai pendapat orang lain dan mulai menunjuk teman sikap saling peduli dan dapat bergaul.
4	Bagaimana pola komunikasi di rumah ketika ada perbedaan pendapat? Apakah anak dilatih menyampaikan pendapat secara sopan?	Di rumah kami sering mendiskusikan untuk berdiskusi dengan tenang dan juga kami sebagai orang tua, mau mendengarkan anak untuk memberi pendapat yang dan kami sebagai orang tua mau mendengarkan anak.
5	Hambatan dari lingkungan rumah/sekitar yang memengaruhi penerapan nilai HAM pada anak?	Kadang di lingkungan sekitar masih ada yang kurang mau menghargai pendapat, sering ada masalah karena banyak ketidakadilan di rumah.
6	Apakah orang tua mendapat informasi dari sekolah tentang program/aturan terkait perlindungan hak siswa (anti-kekerasan/anti-bullying)?	Ya biasanya sekolah memberi informasi melalui tatap muka atau tentang pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan siswa.
7	Bagaimana bentuk dukungan orang tua untuk memperkuat nilai HAM yang dipelajari di sekolah?	Kami memberikan contoh nyata tentang perilaku yang baik rumah, mengajarkan anak untuk menghargai orang lain.
8	Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan sekolah agar pendidikan HAM lebih berdampak?	Sekolah perlu memberikan diskusi, sosialisasi tentang HAM dalam menegakkan aturan sekolah agar siswa lebih memahami penerapan HAM di sekolah.

D. Wawancara Kepala Sekolah/Wakasek Kurikulum

D. Wawancara Kepala Sekolah/Wakasek Kurikulum

Nama : HJ. MURMIAI, M. Pd
Jabatan : WAKIL KEPALA SEKOLAH
Lama bertugas : 22 TAHUN

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kebijakan sekolah mendukung pembelajaran PPKn berbasis HAM?	SMP Negeri 4 Pene, Nabuandun dan Panti, Panti belajar HAM untuk Menjaga Siswa dari kekerasan.
2	Apakah ada program sekolah yang menguatkan kesadaran HAM siswa (tata tertib, pencegahan kekerasan, layanan BK, kegiatan OSIS)?	Ya ada Program Pencegahan kekerasan bullying, baik itu sama dengan BK dan PPKn, terapan melalui sosialisasi dan layanan dan pembinaan.
3	Dukungan apa yang diberikan sekolah kepada guru (pelatihan, sumber belajar, supervisi) untuk mengajar HAM?	Sekolah bisa memberikan dukungan dan pelatihan serta memberikan UU dan Peraturan Pelanggaran / Workshop tentang Panti di sekolah.
4	Hambatan sekolah dalam penguatan HAM di lingkungan siswa, dan langkah yang sudah dilakukan?	- Hambatan yang dihadapi di sekolah adalah kurangnya pemahaman siswa tentang HAM. - Langkah yang sudah diambil adalah dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan.
5	Indikator apa yang sekolah gunakan untuk melihat perubahan perilaku siswa terkait kesadaran HAM?	- Indikator yang digunakan untuk melihat perubahan perilaku siswa adalah dengan melakukan observasi dan wawancara dengan siswa. - Melakukan observasi dan wawancara dengan siswa.

2) Instrumen Observasi Partisipatif

2) Instrumen Observasi Partisipatif

No	Pernyataan Observasi	YA/TIDAK	Catatan
1	Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang terkait HAM dan relevan dengan kehidupan siswa.	Ya	
2	Guru menggunakan contoh kasus (sekolah/masyarakat) untuk mengaitkan konsep HAM.	Ya	
3	Metode pembelajaran bersifat partisipatif (diskusi, studi kasus, debat, proyek, role play).	Ya	
4	Guru memberi ruang siswa berpendapat tanpa takut disalahkan/direndahkan.	Ya	
5	Siswa menghargai pendapat berbeda (tidak mengejek, tidak memotong pembicaraan).	Ya	.
6	Guru menekankan prinsip anti-diskriminasi dan keadilan saat interaksi kelas.	Ya	.
7	Terlihat praktik penyelesaian konflik/beda pendapat melalui musyawarah/argumen yang tertib.	Ya	
8	Ada penegasan tentang hak dan kewajiban (tidak hanya "hak" tetapi juga tanggung jawab).	Ya	
9	Guru memberi penguatan nilai empati dan kepedulian sosial pada siswa.	Ya	
10	Guru melakukan penilaian proses/sikap (refleksi, jurnal, observasi sikap, rubrik).	Ya	
11	Siswa menunjukkan perilaku mencegah kekerasan verbal (bahasa sopan, tidak merundung).	Ya	
12	Media/sumber belajar mendukung pemahaman HAM (lembar kasus, video, berita, poster).	Ya	

Hasil Observasi













3] INSTRUMEN DOKUMENTASI

No	Dokumen/Artefak	Keterangan (Ada/Tidak, Sumber, Tanggal, Catatan)
1	Silabus PPKn kelas IX (muatan HAM)	
2	RPP/Modul ajar PPKn berbasis HAM	
3	Bahan ajar (handout, PPT, LKPD, studi kasus)	
4	Media pembelajaran (video, poster, tautan berita, artikel)	

5	Instrumen penilaian (rubrik sikap, jurnal refleksi, tugas proyek)	
6	Dokumen evaluasi hasil belajar (rekap tugas/ulangan terkait HAM)	
7	Tata tertib sekolah terkait anti-kekerasan/anti-bullying/disiplin	
8	Catatan BK (tanpa membuka identitas sensitif) terkait konflik/perundungan (jika relevan)	
9	Dokumentasi kegiatan sekolah yang mendukung HAM (OSIS, penyuluhan, apel tema, kampanye)	
10	Foto/video pembelajaran (jika diizinkan) dan catatan observasi kelas	